

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus , Erwan Purwanto, 2012, Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2017, *Perihal Undang-Undang*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Attamimi, A. Hamid S, 20 September 1993, *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan peraturan Kebijaksanaan*, Pidato Purna Bakti, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Bagir Manan, 1994, *Peraturan Kebijakan, Makalah*, Jakarta.
- Direktorat Sistem Perbendaharaan Keuangan Negara, 2011, *Modul Penyuluh Perbendaharaan*, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jakarta.
- Farida, Maria Indriyati Soeprapto, 2017, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 2017, *Ilmu Perundang-undangan 2, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hadisoeparto, Hartono, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia Edisi 4*, Liberty, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketiga belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Huda, Ni'Matul dan R. Nazriyah, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Immanuel W. Nalle, Victor, 2013, *Konsep Uji Materiil Kajian Pembentukan dan Ujian Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Kamaroesid, Herry dan Muhammad Sutarsa, 2010, *Pembuat Komitmen, Wewenang, dan Tanggung Jawabnya dalam Pelaksanaan APBN/APBD*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Khaleed, Badriyah, 2014, *Legislative Drafting*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Lailam, Tanto, 2017, *Teori & Hukum Perundang-undangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mahfud, Mohammad MD, 2007, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marbun, SF, Moh Mahfud MD, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2018, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2009, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Bahan Kuliah, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada*, Yogyakarta.
- Syafrudin, Ateng, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Bandung.
- Tjandra, W. Riawan, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*, Medpress, Yogyakarta.

Makalah

- Muchsan, “Politik Hukum”, *Materi Kuliah Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 6 September 2017.

Jurnal

- Abdul Rokhim, *Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan*, *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol.XIX, No.36, Februari-Mei 2013.
- Wagiman, “Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya”, *Jurnal Filsafat Hukum*, Vol.1, No.1, 2016.

Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan, <http://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses 4 Desember 2019
- <Http://digilib.unila.ac.id/5276/11/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 18 Januari 2020.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 729)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1025)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1388)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862)

Keputusan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.01/2018 tentang Mandat Menteri Keuangan Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Untuk Dan Atas Nama Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan

Surat

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-944/PB/2019 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat KPPN Bulan Juli sampai dengan Bulan November 2019